

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAP
NO 05 TAHUN 2010 PADA BADAN KEPENDUDUKAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN) POVINSI RIAU**

Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Tugas-tugas Akademik dan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh :

ANGGI LALITA
NIM. 01870423753

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANGGI LALITA
 NIM : 01870423753
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN
 BERDASARKAN PSAP No. 05 TAHUN 2010 PADA
 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
 BERENCANA NASIONAL PROVINSI RIAU

Pekanbaru, 22 Oktober 2021

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING

Febri Rahmi, SE, M.Sc.Ak.CA
NIP.1972029 200604 2002

MENGETAHUI



DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP.19760826 199903 2001

KETUA PRODI

Dr. Hj. Hariza Hasvim, SE, M.Si
NIP.19760910 200901 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ANGGI LALITA
 NIM : 01870423753
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : **ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN BERDASARKAN PSAP No. 05 TAHUN 2010 PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI RIAU**
 HARI/TANGGAL : JUMAT, 22 Oktober 2021

DISAHKAN OLEH :

TIM PENGUJI

KETUA

Faiza Muklis, SE, M.Si

NIP : 19741108 200003 2 004

PENGUJI I

Hji. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA

NIP : 19680823 201411 2 001

PENGUJI II

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA

NIP : 19791010 200710 2 011



lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANGGI LALITA

NIM : 01870423753

Tempat/Tgl. Lahir : Bukit tiram, 25 februari 2000

Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOCIAL

Prodi : D-III AKUNTANSI

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Akuntansi persediaan Berdasarkan PSAP No. 05 tahun 2000
pada badan kependudukan dan keluarga berencana Nasional Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 november 2021

Yang membuat pernyataan



[Signature]

Anggi Lalita

NIM : 01870423753

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No 05 tahun 2010 Pada Bahan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Povinsi Riau.

***Oleh: Anggi lalita
01870423753***

Persediaan adalah aset lancar berupa barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional. Persediaan yang ada di instansi pemerintah tentunya mendapatkan perlakuan akuntansi. Pedoman yang digunakan oleh Instansi Pemerintah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 05 tentang Inventarisasi. Setiap laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu Instansi Pemerintah tentunya akan dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah di suatu daerah. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang jasa khususnya dalam mengatasi ledakan penduduk di Riau. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memiliki gudang untuk menyimpan perbekalan operasional, termasuk perbekalan alat kontrasepsi. Permasalahan yang ditemui di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah ketidaksesuaian dalam penyajian dan pengungkapan perbekalan kontrasepsi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu hasil yang akan ditampilkan berupa kalimat-kalimat atau uraian tentang apa yang diamati. Objek penelitian ini menggunakan data tahun berjalan 2020.. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah perwakilan BKKBN Provinsi Riau tidak mengeluarkan nilai stok alat kontrasepsi yang rusak atau kadaluarsa dan tidak menjelaskan kondisi sebenarnya pada saat terjadi persediaan alat kontrasepsi yang rusak atau usang.

Keywords: supplies, contraceptives, bkkbn, Riau , psap no. 5



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Persediaan berdasarkan PSAP No.05 Tahun 2010 di BKKBN Provinsi Riau”.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan penuh kedamaian yang kita miliki seperti sekarang ini. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses

menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, perhatian, bantuan, motivasi serta masukan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Ismail dan Ibunda Salinah yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, nasehat, dukungan moril, materil, dan do'a kepada penulis serta selalu menjadi motivasi utama dalam hidup.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I,II, dan III.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Dr.Hj.Hariza Hasyim, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan D3 Akuntansi fakultas ekonomi dan ilmu sosial yang banyak meluangkan waktu dan segalanya.
5. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Si, Ak, selaku Sekretaris Jurusan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan sebagai dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan nasehat,motivasi dan semangat agar penulis dapat membuat tugas akhir hingga selesai.
6. Bapak Dony Martias, SE , MM selaku Penasehat Akademis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.
8. Perwakilan BBKBN Provinsi Riau yang telah membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan, bersedia di wawancara, dan mau memberikan data sehingga penulis mendapatkan data dengan baik dan benar.
9. Kakak-kakak tersayang abang Bambang, abang Ismawan, abang Ilham, abang alm.Angga, kakak Yani, kakak Lia, kakak Lasmi serta keponakan-keponakan tersayang Dava, Azuwa, Elgio, Arsyah, Nadira terimakasih untuk doa, perhatian, semangat, dorongan yang slalu diberikan agar penulis menjadi lebih semangat lagi.
10. Orang spesial yang telah melungkan waktunya kepada penulis membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari tempat penelitian abang Muhammad Rozan Zuhairi Hrp
terimakasih waktu dan kesabarannya untuk selalu menemani melakukan
penelitian.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Dona alfayanti, Nur azrin, Yuta citra, Putri
mulyani, terimakasih untuk kerja samanya selama ini, doa, perhatian,
dukungan, semangat yang slalu diberikan agar penulis menjadi lebih
semangat lagi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir
ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan
terimakasih banyak atas dukungan dan motivasi nya.

Pekanbaru, September 2021

Penulis

Anggi Lalita

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
2.1 Sejarah BKKBN.....	11
2.2 Struktur Organisasi.....	23
2.3 Visi dan Misi BKKBN.....	25
2.4 Nilai BKKBN.....	25
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi	26
2.6 Kewenangan BKKBN.....	28
2.7 Logo BKKBN	29
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	
3.1 Tinjauan Teori.....	30
3.2 Tinjauan Praktek	60



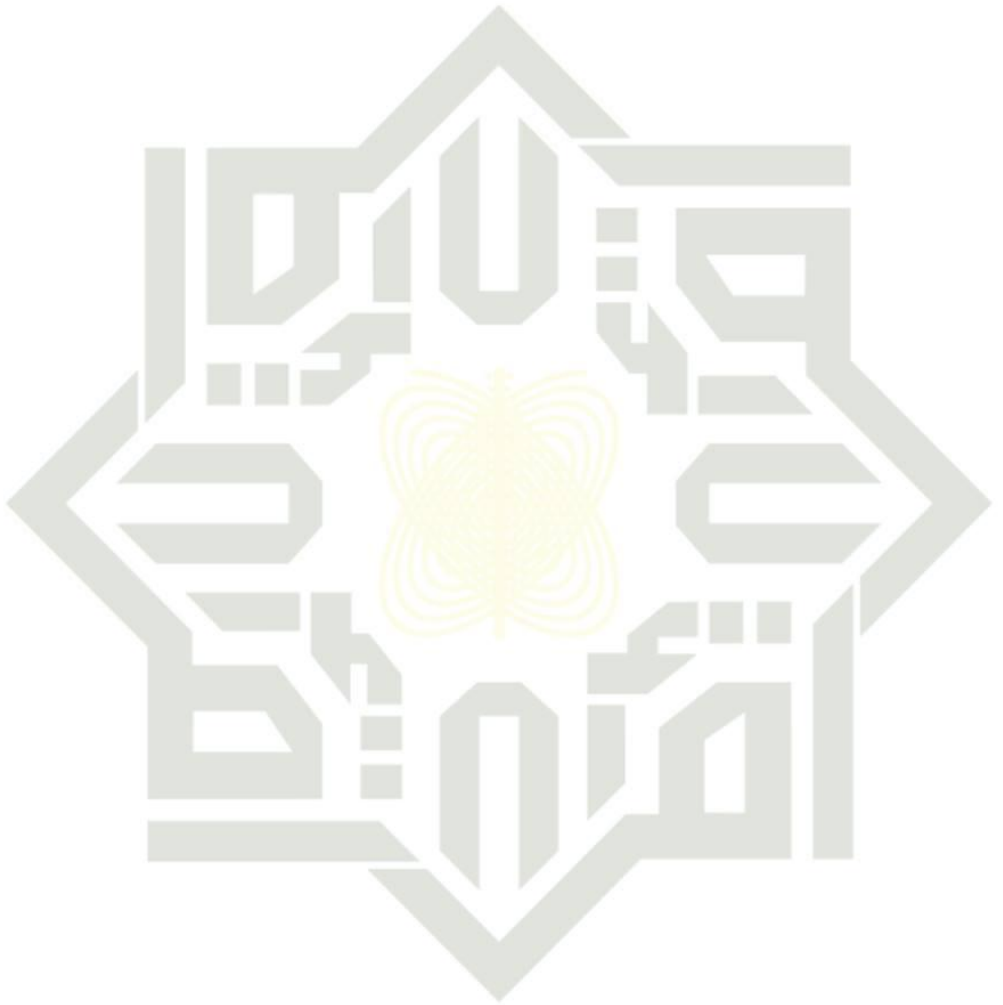
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PENUTUP	
	4.1 Kesimpulan	73
	4.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Tabel Anggaran	5
Gambar 2.1	Tabel Jurnal Penyesuaian Pendekatan Aset	52
Gambar 2.2	Tabel Jurnal Penyesuaian Pendekatan Beban	53
Gambar 2.3	Tabel Neraca Instansi Pemerintah.....	55
Gambar 3.1	Tabel Perbandingan Pencatatan Saat Pembelian.....	65
Gambar 3.2	Tabel Perbandingan Pencatatan Beban Persediaan	66
Gambar 3.3	Tabel Perbandingan Pengungkapan dan Penyajian	70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

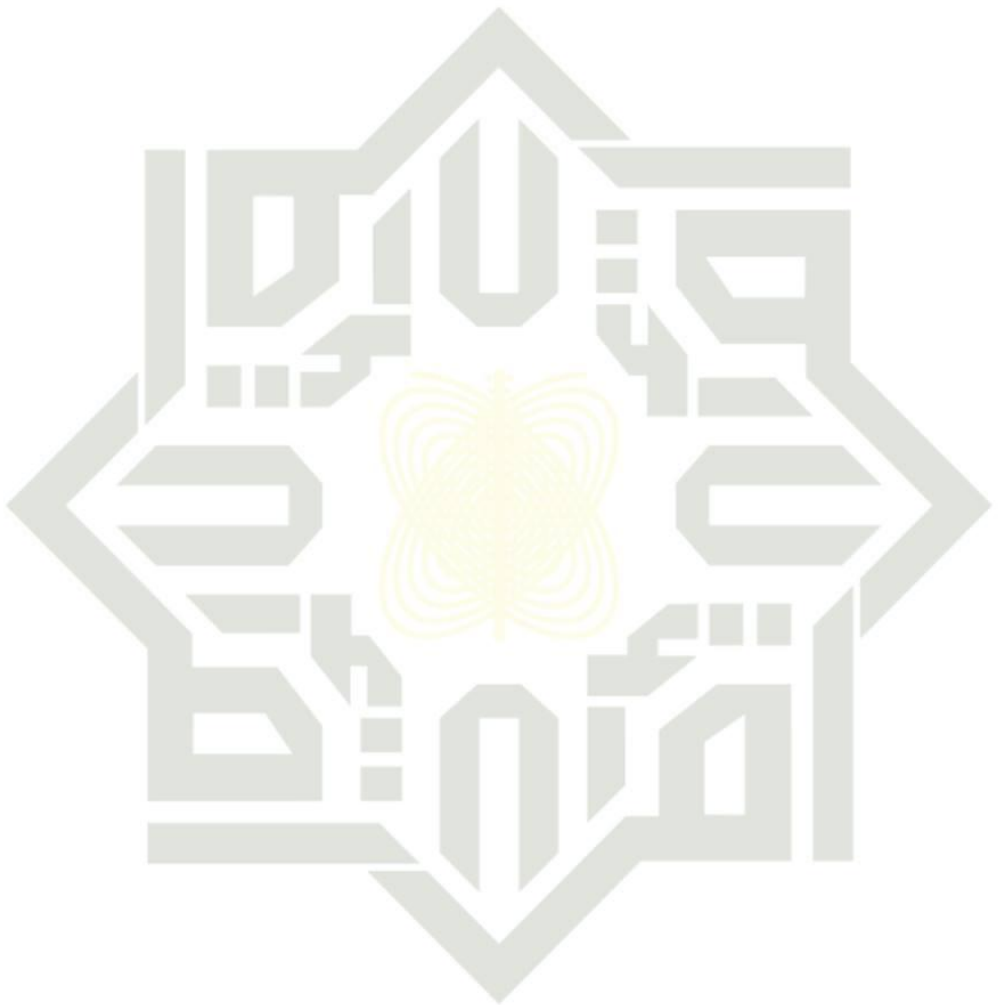
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	12
Gambar 2.2	Logo BKKBN Riau	13
Gambar 3.1	Laporan akhir Persediaan	72



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap Instansi Pemerintah tentu tidak jauh dari kegiatan Akuntansi Pemerintah. Instansi Pemerintah tidak jauh dari lingkup politik, namun lingkup ekonomi tidak dapat diabaikan. Pemerintah tentu memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat atas kegiatan akuntansi yang telah dilaksanakan untuk lebih transparansi dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Akuntansi pemerintah yang digunakan yaitu berbasis akrual.

Setiap Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional tentu didukung dengan adanya persediaan. Persediaan ini biasanya didapatkan dengan cara membeli atau mendapatkan distribusi dari pusat. Instansi Pemerintah pasti akan melakukan pencatatan atas persediaan yang didapatkan dengan acuan yang ada. Instansi Pemerintah dalam hal ini menganut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perlakuan persediaan untuk pemerintah sudah ditetapkan di dalamnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah kerangka acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). SAP semula ditetapkan pada PP RI No. 24 Tahun 2010, lalu digantikan dengan PP RI No. 71 Tahun 2010. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengaturan Standar Pemerintahan dan disusun berdasarkan kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP No 05 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ini adalah standar yang mengatur tentang akuntansi persediaan yang disahkan pada tahun 2005 dan diperbaharui pada tahun 2010. Dalam PSAP terdapat 11 point yang diantaranya PSAP No 05 yang diambil dalam penelitian kali ini. PSAP No 05 mengatur berbagai standar akuntansi persediaan berdasarkan peraturan pemerintahan di Indonesia.

Yang dibahas pada tugas akhir ini adalah persediaan yang ada di BKKBN Provinsi Riau yang mencakup barang-barang yang diserahkan dan dipakai masyarakat yaitu alat-alat kontrasepsi dan obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau adalah Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang jasa atau lebih tepatnya pelayanan dalam menanggulangi meledaknya penduduk di Riau. Agenda yang sering dilakukan oleh BKKBN Provinsi Riau adalah Perjalanan Dinas yang berkaitan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan tentang cara mencegah meledaknya penduduk dengan cara suntik KB, pemakaian alat kontrasepsi, MOW, MOP, dan sebagainya.

BKKBN yang masyarakat ketahui tentu tidak jauh dari Alat Kontrasepsi (Alkon). Perwakilan BKKBN Provinsi Riau juga mendapatkan persediaan alkon. Persediaan alkon ini didapatkan BKKBN Provinsi Riau dengan dua cara yaitu pengadaan barang dan transfer masuk dari BKKBN Pusat dan/atau BKKBN Provinsi Lain. Ketika Alat dan obat kontrasepsi datang maka langsung di masukkan ke dalam gudang, lalu akan dicatat pada buku barang masuk dan kartu persediaan.

Persediaan alat dan obat kontrasepsi ini nantinya akan dibagikan dan diserahkan ke masyarakat sebagai mana mestinya tanpa adanya pemungutan biaya karna memang alat dan obat tersebut gratis dibagikan melalui puskesmas-puskesmas daerah, dinas kesehatan daerah, kader-kader KB disetiap daerah yang dibawah naungan BKKBN Provinsi Riau.

Permasalahan yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau ini adalah ketidaksesuaian penyajian dan pengungkapan pada persediaan. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau memperoleh alat kontrasepsi dari BKKBN Pusat melalui kegiatan pengadaan barang dan transfer masuk. Menurut PSAP No. 05, persediaan dalam keadaan usang atau rusak tidak dapat disajikan dalam neraca serta harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Faktanya pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, persediaan alat kontrasepsi yang usang atau rusak disajikan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

neraca dan tidak diungkapkan pada CaLK. Dampak dari kesalahan penyajian dan pengungkapan persediaan alat kontrasepsi ini tentu akan menghasilkan laporan keuangan yang tidak benar, tidak valid, serta tidak sesuai dengan acuan yang terdapat pada SAP, khususnya PSAP No. 05. Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan apakah perlakuan akuntansi persediaan selain pengukuran juga terdapat ketidaksesuaian antara Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dengan PSAP No.05. Walaupun jarang terjadi adanya barang rusak atau cacat baik rusak dalam perjalanan atau cacat saat pembuatannya, namun apapun alasan dibalik itu ada sebaiknya harus dicatat juga agar laporan yang disajikan terperinci dan sesuai dengan PSAP No 05.

Dalam mendapatkan stok alat dan obat BKKBN menentukan anggaran sesuai dengan permintaan puskesmas-puskesmas daerah dan berbagai instansi yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat, terjadinya barang kadaluarsa atau penumpukan barang paling sering terjadi karena kelebihan stok tak jarang BKKBN pusat memberi alat dan obat kontrasepsi melebihi pengadaan anggaran yang diminta maka terjadi penumpukan barang dan sering juga terdapat yang kadaluwarsa.

Jika barang kadaluarsa maka pihak BKKBN memusnahkannya dengan meleburkan yang nantinya akan diserahkan pada pihak ketiga, agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila dibuang sembarangan, pihak ketiga yang meleburkan barang kadaluwarsa ini juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

diberi anggaran karna yang dileburkan tidak 1 atau 2 pcs melainkan beribu pcs.

Dalam pembagian alat dan obat kontrasepsi pihak BKKBN menetapkan metode FIFO yang pertama masuk itu yang pertama keluar atau dibagikan, masing-masing masa kadaluwarsa alat dan obat bervariasi rentan waktu 1-5 tahun, jika obat-obat itu disimpan disuhu dingin agar lebih steril begitu juga sunti-suntik atau iyud harus steril dan bersih.

anggaran alat dan obat 2019-2020.

Table 1.1

ANGGARAN ALAT DAN OBAT KONTASEPSI	
TAHUN 2019-2020	
2019	2020
11,496,943,350	5,935,068,367

Sumber: laporan rincian barang persediaan, BKKBN Riau tahun anggaran 2020.

Terdapat penurunan anggaran karena stok berlebih pada tahun sebelumnya masih terdapat digudang yang nanti nya pada saat ada permintaan barang maka yang persediaan sebelumnya yang akan dibagikan lebih dulu. Namun penulisan laporan catatan anggaran laporan keuangan tidak ditulis atas kelebihan stok tersebut jadi BKKBN hanya menambah stok yang kurang sebanyak yang diminta oleh puskesmas-puskesmas maupun instansi kesehatan lainnya dibawah BKKBN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk barang rusak dan usang baik ringan, berat atau sedang yang seharusnya dimasukan jelas dilaporan keuangan juga tidak ditulis oleh BKKBN melainkan hanya :

Keterangan:

1. Persediaan Rp.0 dalam kondidi rusak
2. Persediaan Rp.0 dalam kondisi usang

Tanpa dijelaskan pembagian rusak sedang berat maupun ringan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengangkat topik ini untuk menjelaskan lebih dalam bagaimana perlakuan akuntansi atas persediaan yang benar dalam SAP dengan judul "ANALISIS AKUNTANSI ATAS PERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PADA PERWAKILAN BKKBN RIAU"

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa masalah dapat dirumuskan:

1. Bagaimana akuntansi persediaan alat dan obat kontrasepsi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan/penyajian, dan pencatatan persediaan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau?
2. Apakah akuntansi persediaan alat dan obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau sesuai dengan PSAP no 05 tahun 2010?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi persediaan alkon dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan/penyajian, dan pencatatan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi persediaan alat dan obat kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau sesuai dengan PSAP no 05 tahun 2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat untuk:

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Perwakilan BKKBN Provinsi Riau untuk memperbaiki perlakuan akuntansi yang telah disesuaikan dengan PSAP 05 tahun 2010.

2. Akademik

referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Terubuk No.1, Wonorejo, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. 28125

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari BKKBN Provinsi Riau dengan melakukan interview atau wawancara kepada Perwakilan BKKBN, kepala gudang dan koordinator keuangan terkait dengan analisis persediaan berdasarkan PSAP No.05 tahun 2010 di BKKBN.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui DOKumen- dokumen seperti Neraca, jurnal transaksi, kartu persediaan, yang telah diarsipkan oleh BKKBN Provinsi Riau, PSAP No.05, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu dengan mengutip data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait yaitu bapak arselan syarif selaku koordinator keuangan dan bapak Andika tri saputra selaku kepala gudang.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan tergolong kedalam penelitian deskriptif kualitatif yang dalam proses penelitian dan pengolahan datanya tidak menggunakan perhitungan, hanya memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan yang di teliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun atas 4 (empat) bab dengan susunan yang sistematis agar memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika penulisan nya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

ini terdiri dari beberapa sub-sub bab yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini mendeskripsikan atau mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari profil dan sejarah singkat berdirinya BKKBN Provinsi Riau, kemudian menjelaskan struktur organisasi serta visi dan misi Perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, mengungkap bagaimana pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pengkajian alat dan bahan kontrasepsi di BKKBN Provinsi Riau sesuai dengan psap no.05.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian, yang membangun dan dapat memberi manfaat bagi perusahaan, penulis, dan peneliti selanjutnya.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah BKKBN

Periode Perintisan (1950-an – 1966)

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)** atau *Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF)*. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967.

Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional

Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut:

1. PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah
2. PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan.
3. PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia.

Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “*Oleh karena itu kita harus*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional.

Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain:

1. Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.
2. Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk **Lembaga Keluarga Berencana Nasional**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968.

Lembaga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah.

Periode Pelita I (1969-1974)

Periode ini mulai dibentuk **Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)** berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah **dr. Suwardjo Suryaningrat**. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden.

Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical Approach) karena pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat.

Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan.

Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project.

▲ *Periode Pelita III (1979-1984)*

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”.

Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik **Prof. Dr. Haryono Suyono** sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisor juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program.

Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye Lingkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Periode Pelita V (1988-1993)

Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh **Prof. Dr. Haryono Suyono**. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrasepsi.

Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maret 1998, **Prof. Dr. Haryono Suyono** ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian.

Pada tanggal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi, maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh **Prof. Dr. Ida Bagus Oka** sekaligus menjadi Menteri Kependudukan.

Periode Pasca Reformasi

Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang-Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya.

Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian:

Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh **Khofifah Indar Parawansa**.

Setelah itu digantikan oleh **Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir** pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan.

Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan **dr. Sumarjati Arjoso, SKM** dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006.

Setelah itu digantikan oleh **Dr. Sugiri Syarief, MPA** yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006.

Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, **Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA** akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan **Prof. Fasli Jalal** sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Pada tanggal 26 Mei 2015 Presiden RI Joko Widodo menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang baru yaitu **dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D**, yang dilantik oleh Menteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek.

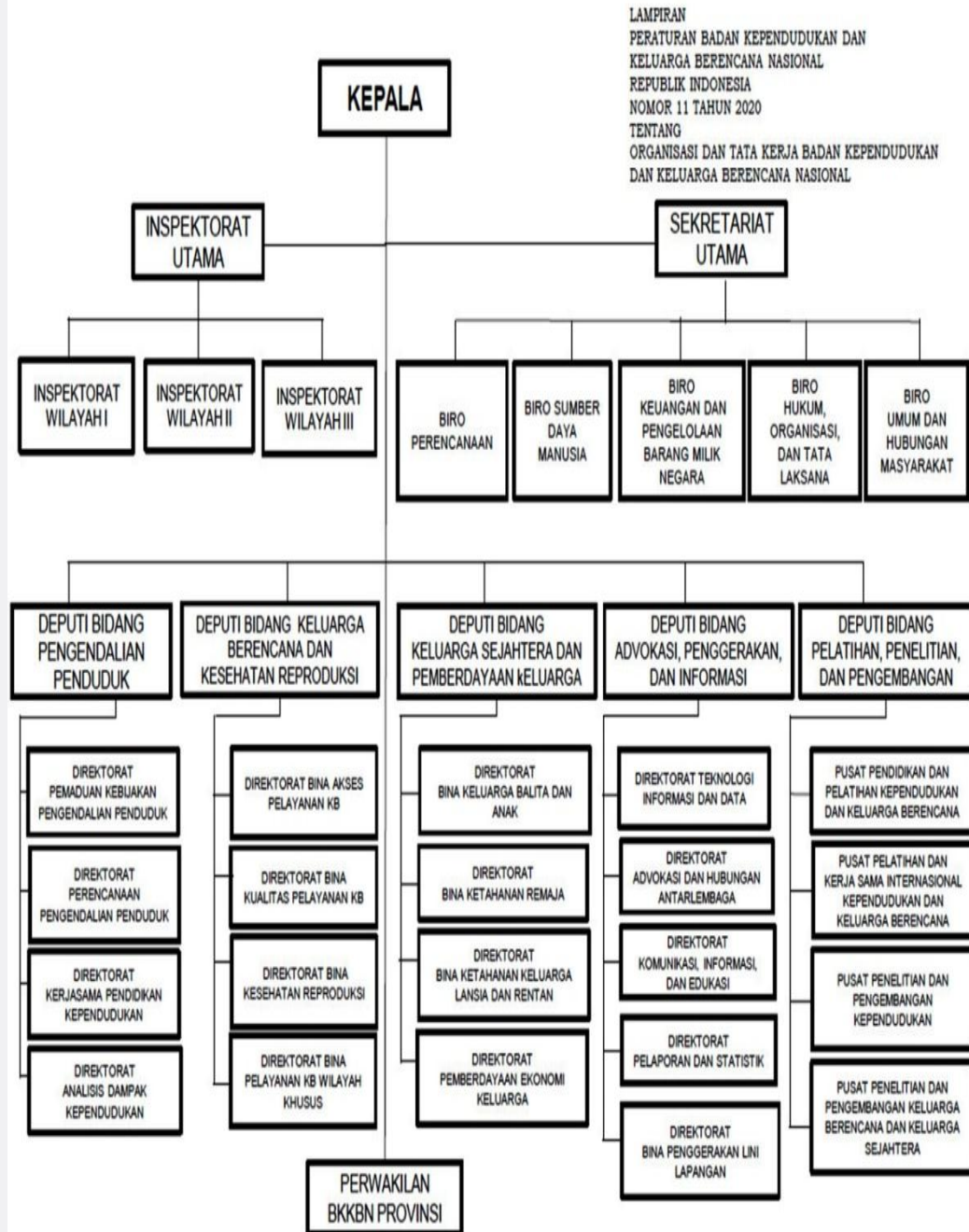
UIN SUSKA RIAU



2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BKKBN :

Gambar 2.1



Sumber : <https://www.bkkbn.go.id/pages/struktur-organisasi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susunan Organisasi dalam Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau yaitu dipimpin oleh Ketua, ketua BKKBN Provinsi Riau saat ini adalah Yenrizal Mahmud kemudian dibantu oleh Sekrtaris Badan, selain itu Ketua dibantu juga oleh Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Umum dan Humas, Sub Bidang Keuangan dan BMN, Sub Bidang Kepegawaian dan Hukum, Sub Bidang Administrasi Pengawasan.

Selain itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau juga langsung membawahi Bidang Pengendalian Penduduk, Bidang Kelaurga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Bidang Advokasi, Pengerakan, dan Informasi, Bidang Pelatihan dan Pengembangan, dan Diklat KBB Pekanbaru.

Wawancara yang dilakukan dengan perwakilan BKKBN Provinsi Riau yaitu Bidang koordinasi keuangan bapak Arselan Syarif dan Kepala bidang BKKBN Provinsi Riau bapak Andika Tri Saputra.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Visi dan Misi BKKBN Provinsi Riau

Visi

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

Misi

- Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

2.4 Nilai BKKBN

1. Cerdas adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Tangguh adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.
2. Kerjasama adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.

3. Integritas adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan.
4. Ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.”

Fungsi

- Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

2.6 Kewenangan BKKBN Provinsi Riau

Kewenangan

- Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
- Promosi dan pergerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
- Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana
- Peningkatan kualitas manajemen program.
- Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
- Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Logo BKKBN Provinsi Riau

Gambar 2.2



Sumber: http://riau.bkkbn.go.id/?page_id=639

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah tercapainya tujuan yang telah disampaikan pada Bab 1 yaitu mengetahui perlakuan akuntansi persediaan alat kontrasepsi dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Tujuan lain yaitu mengetahui kesesuaian antara teori dan lapangan. Maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi atas persediaan alat kontrasepsi di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mengakui persediaan alat kontrasepsi pada saat barang telah diinput pada Aplikasi Akuntansi Persediaan (UAKPB).
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melaksanakan pengukuran dengan menggunakan biaya perolehan, karena cara utama dalam mendapatkan alat kontrasepsi yaitu pengadaan barang yang dikirim oleh supplier pusat sesuai dengan permintaan puskesmas ataupun klinik.
3. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menerapkan metode First In First Out (FIFO) pada saat proses pengeluaran persediaan alat kontrasepsi dari gudang. Pencatatan yang diterapkan yaitu secara aktual dengan metode Perpetual yaitu mencatat setiap barang masuk dan keluar pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kartu persediaan, sehingga nilai dalam kartu persediaan selalu diperbarui. Pencatatan beban persediaan yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau adalah pendekatan aset. Beban diakui ketika telah dipakai atau telah didistribusikan kepada pihak ketiga.

4. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menyajikan dan mengungkapkan persediaan alat kontrasepsi dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 05.

4.2. Saran untuk BKKBN dan Peneliti selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Intansi guna meningkatkan kinerja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, yaitu

- a. Diharapkan pada saat penyajian nilai persediaan pada neraca, hendaknya pada saat melaksanakan stock opname harus diteliti kembali kondisi persediaan alat kontrasepsi yang rusak atau usang walaupun minim sekali terjadinya kerusakan dan nilai atas persediaan alat kontrasepsi yang rusak atau usang tersebut harus di keluarkan dari neraca.
- b. Diharapkan pada saat pengungkapan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) hendaknya dijelaskan bagaimana kondisi persediaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat kontrasepsi secara detail agar Laporan Keuangan yang ditampilkan kepada Masyarakat benar-benar valid.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan di atas terdapat saran yang bisa dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya, yaitu

- a. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian perlakuan akuntansi khususnya persediaan pada subjek penelitian yang berbeda tetapi sejenis.
- b. Peneliti juga dapat mengembangkan penelitian perlakuan akuntansi pada aspek lain jika meneliti subjek penelitian yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Artif, B., Muchlis, & Iskandar. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Artikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS (Ed.1)*. Yogyakarta: Andi.
- Boldric, dkk. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Selemba Empat.
- Carl S. Warren, dkk. 2014. *Aconting indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- Danim, S. (2015). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gulo, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hermawan, Sigit. 2013. *Akuntansi Perusahaan Manufaktur*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikhsan. Arfan. (2017). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Kieso. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Selemba Empat
- Moloeng, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marisyidi. (2014). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Martani, dkk.(2016). *Akuntansi Keuangan Lanjutan I*. Jakarta: Selemba Empat.
- Marshall, dkk. (2014). *Sistem Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- PSAP No.05 tahun 2010.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Ragkuti, F. (2011). *Manajemen Persediaan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ramayani, A. N., & Utami, W. P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 157-159.



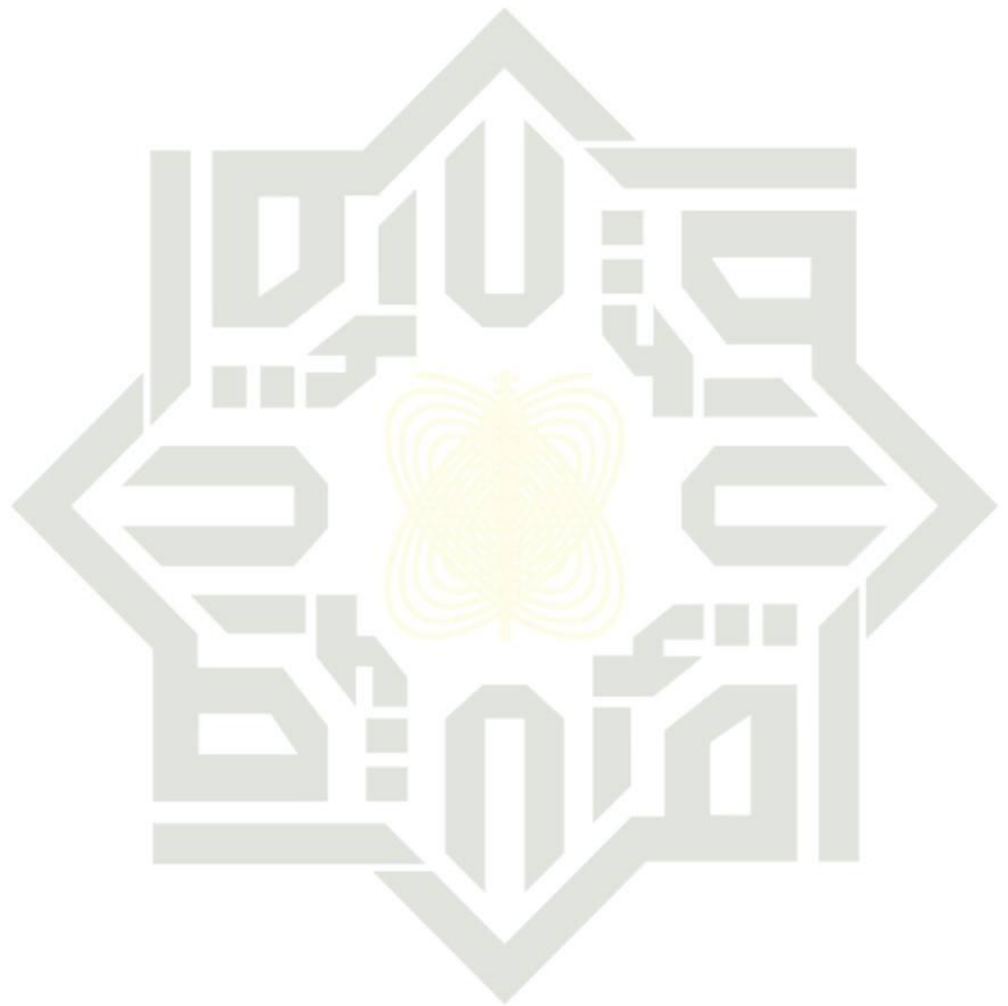
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramono, D., & Sholihin, M. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Samryn, L. M. 2011. *Pengantar Akuntansi : Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yamit, Z. (2012). *Manajemen Persediaan*. Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa filosofi atau strategi BKKBN Provinsi Riau?
“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”
2. Bagaimana susunan organisasi di BKKBN Provinsi Riau?
“Dipimpin oleh ketua Bapak Henrizal hadi, dibantu sekretaris sesuai dengan bidang dan berbagai bidang keorganisasian, selengkap bisa di liat di BKKBN link”
3. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mendapatkan barang kontrasepsi?
“Dengan cara pengadaan barang dan transfer masuk tetapi lebih sering dengan pengadaan barang dengan mengeluarkan anggaran yang nanti diberikan oleh pusat”
4. Bagaimana pencatatan akuntansi persediaan yang diberlakukan di BKKBN Provinsi Riau?
“Pencatatan di BKKBN Riau dengan metode perpetual karna barang barang kesehatan harus dengan kontrol yang lebih agar selalu terupdate kondisi nya dan selalu steril”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Apakah pencatatan akuntansi persediaan di BKKBN sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

“Menurut saya ini sudah sesuai namun kami selalu mengondisikan dan menerapkan pencatatan dengan sebaik mungkin sesuai dengan PSAP NO 05 agar catatan laporan keuangan yang disajikan adalah sebenar benarnya”
6. Pihak mana saja yang terkait dengan pencatatan persediaan di BKKBN ?

“Pihak yang terkait dengan pencatatan adalah sub bidang keuangan dan gudang yang ada salah satunya bapak Arsenal Syarif dan bapak andika tri saputra”
7. Berapa berapa kali sekali barang yang meliputi alat dan obat kontrasepsi datang ke gudang BKKBN ?

“Barang yang datang ini sesuai dengan pengadaan barang yang diminta oleh BKKBN Riau bisa sebulan sekali bahkan lebih sesuai kebutuhan atau permintaan yang ada, tetapi pengadaan yang diminta BKKBN adalah sebulan sekali termasuk anggaran-anggaran barang yang lain”
8. Setiap barang datang apakah ada barang yang rusak atau cacat? Kalau ada bisakah dipersenkan berapa banyak kerusakan yang diterima, dan tindakan apa yang dilakukan pada barang rusak tersebut?

“Sangat jarang sekali terdapat barang yang cacat baik barang rusak diperjalanan maupun barang yang rusak saat pengiriman”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Berapa lama tahannya barang yang ada digudang sebelum dibagikan?
“sesuai dengan masa kadaluarsa setiap barang, masa tahan nya berbeda-beda rentan waktu 3-5 tahun”
10. Jika ada kerusakan pada barang, dicatat di neraca atau di catatan atas laporan keuangan? Apakah dipisah barang yang rusak berat dengan yang rusak ringan?
“tidak dicatat karna jarang sekali barang yang rusak maka kami menganggap semua barang dalam keadaan baik, tetapi dalam penyajian persediaan kami sajikan di neraca dan untuk pengungkapannya tidak kami tulis atau pisah barang rusak ringan, berat, atau kadaluarsa”
11. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mengakui persediaan alkon yang masuk ke gudang?
“Kami mengakui barang apabila sudah di input ke aplikasi akuntansi persediaan, apabila belum terinput maka belum menjadi barang milik BKKBN”
12. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau dalam mencatat beban persediaan?
“BKKBN Riau dalam mencatat beban persediaan dengan pendekatan aset karena saat pembelian dicatat persediaan (aset lancar) jurnalnya beban persediaan pada persediaan”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Misal, ada barang baru masuk tetapi barang lama masih ada, apakah yang dibagikan barang lama dulu atau bagaimana ?

“BKKBN Riau menggunakan metode FIFO dalam mengeluarkan barang yaitu barang yang pertama kali masuk adalah barang yang pertama kali keluar sesuai dengan harga barang pada saat pertama kali beli, karena menghindari penumpukan barang dan menghindari barang kadaluarsa”

14. Untuk diteliti lebih lanjut bolehkah mendokumentasi kan neraca,jurnal transaksi,kartu persediaan dan catatan persediaan yang masuk maupun keluar.

“kami memberikan data real tahun 2020 dari Awal sampai akhir periode boleh diteliti sebagaimana judul ananda”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN

Riau

Pekanbaru, 8 September 2021

Nomor : 2002 /KP.08/J1/2021
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sub Koordinator Kepegawaian dan Hukum Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menerangkan bahwa :


Nama : Anggi Lalita
 NIM : 01870423753
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang : DIII
 Universitas : UIN Suska Riau

Telah selesai melakukan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data di Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, dengan judul penelitian:

“Perlakuan Akuntansi Atas Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Berdasarkan PSAP No. 05 Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau”.

Demikian sura keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan seperlunya.

Sub Koordinator Kepegawaian dan Hukum
 Perwakilan BKKBN Provinsi Riau


 Ratih Nur Rahmadani, S.Farm, Apt
 NIP. 19900424 201402 2 001

Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
 Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru 28125
 Telp. (0761) 22004, 38006 Fax. (0761) 38006
 Website : <http://www.bkkbn.go.id/riau>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN WAWANCARA OLEH NARASUMBER

© Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar wawancara **Perlakuan Akuntansi Persediaan atas Alat dan Obat Kontrasepsi Berdasarkan PSAP No 05 Pada Bahan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Povinsi Riau.**

1. Apa filosofi atau strategi BKKBN Provinsi Riau?
2. Bagaimana susunan organisasi di BKKBN Provinsi Riau?
3. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mendapatkan barang kontrasepsi?
4. Bagaimana pencatatan akuntansi persediaan yang diberlakukan di BKKBN Provinsi Riau?
5. Apakah pencatatan akuntansi persediaan di BKKBN sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?
6. Pihak mana saja yang terkait dengan pencatatan persediaan di BKKBN ?
7. Berapa berapa kali sekali barang yang meliputi alat dan obat kontrasepsi datang gudang BKKBN ?
8. Setiap barang datang apakah ada barang yang rusak atau cacat? Kalau ada bisakah dipersenkan berapa banyak kerusakan yang diterima, dan tindakan apa yang dilakukan pada barang rusak tersebut?
9. Berapa lama tahannya barang yang ada digudang sebelum dibagikan?
10. Jika ada kerusakan pada barang, dicatat dineraca atau di catatan atas laporan keuangan? Apakah dipisah barang yang rusak berat dengan yang rusak ringan?
11. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mengakui persediaan alkon yang masuk ke gudang?
12. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau dalam mencatat beban persediaan?
13. Misal, ada barang baru masuk tetapi barang lama masih ada, apakah yang dibagikan barang lama dulu atau bagaimana ?
14. Untuk diteliti lebih lanjut bolehkah mendokumentasi kan neraca,jurnal transaksi,kartu persediaan dan catatan persediaan yang masuk maupun keluar.

Ort Koordinator Keuangan

ARSJELAN SYARIP

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar wawancara Perlakuan Akuntansi Persediaan atas Alat dan Obat Kontrasepsi Berdasarkan PSAP No 05 Pada Bahan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau.

1. Apa filosofi atau strategi BKKBN Provinsi Riau?
2. Bagaimana susunan organisasi di BKKBN Provinsi Riau?
3. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mendapatkan barang kontrasepsi?
4. Bagaimana pencatatan akuntansi persediaan yang diberlakukan di BKKBN Provinsi Riau?
5. Apakah pencatatan akuntansi persediaan di BKKBN sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?
6. Pihak mana saja yang terkait dengan pencatatan persediaan di BKKBN ?
7. Berapa berapa kali sekali barang yang meliputi alat dan obat kontrasepsi datang ke gudang BKKBN ?
8. Setiap barang datang apakah ada barang yang rusak atau cacat? Kalau ada bisakah dipersenkan berapa banyak kerusakan yang diterima, dan tindakan apa yang dilakukan pada barang rusak tersebut?
9. Berapa lama tahannya barang yang ada di gudang sebelum dibagikan?
10. Jika ada kerusakan pada barang, dicatat di neraca atau di catatan atas laporan keuangan? Apakah dipisah barang yang rusak berat dengan yang rusak ringan?
11. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau mengakui persediaan alkon yang masuk ke gudang?
12. Bagaimana BKKBN Provinsi Riau dalam mencatat beban persediaan?
13. Misal, ada barang baru masuk tetapi barang lama masih ada, apakah yang dibagikan barang lama dulu atau bagaimana ?
14. Untuk diteliti lebih lanjut bolehkah mendokumentasi kan neraca jurnal transaksi, kartu persediaan dan catatan persediaan yang masuk maupun keluar.

Kepala gudang BKKBN Prov. Riau


ANDIKA TRI SAPUTRA

LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UAPB : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 UAPPB-EI : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 UAPPB-W : PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU

LAPORAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TAHUN ANGGARAN : 2020

UAKPB : PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU
 KODE UAKPB : 068010900433011000KD

KODE	URAIAN	NILAI S/D 31 DESEMBER 2019	MUTASI		NILAI S/D 31 DESEMBER 2020
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	49,002,697		39,345,280	9,657,41
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual	13,455,000		1,345,000	12,110,00
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan	0	907,842,000		907,842,00
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk	1,614,548,707	3,390,910,243		5,005,458,95
117199	Persediaan Lainnya	9,819,936,946		9,819,936,946	
	Jumlah	11,496,943,350			5,935,068,36

Disetujui tanggal : 30 Desember 2020
 Kuasa Pengguna Barang,
 PETUGAS UAKPB

FADLI,SE
 NIP. 198512052019021003

PEKANBARU, 30 Desember 2020
 Petugas Pengelola Barang Persediaan,
 PETUGAS PERSEDIAAN

ANDIKA TRI SAPUTRA
 NIP. 197501052008121001

NERACA

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAJET
Tanggal: 18/06/21
Halaman: 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WILAYAH/PROPINSI : 0900 RIAU
SATUAN KERJA : 433011 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI RIAU
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	0	17,662,608	(17,662,608)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(88,313)	88,313	(100.00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	17,574,295	(17,574,295)	(100.00)
Persediaan	5,935,068,367	11,496,943,350	(5,561,874,983)	(48.37)
JUMLAH ASET LANCAR	5,935,068,367	11,514,517,645	(5,579,449,278)	(48.45)
ASET TETAP				
Tanah	31,338,240,000	31,338,240,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	8,967,811,418	9,651,533,746	(683,722,328)	(7.08)
Gedung dan Bangunan	9,453,392,088	11,560,259,088	(2,106,867,000)	(18.22)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	283,650,100	283,650,100	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	14,950,000	14,950,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(8,592,684,112)	(8,811,408,229)	218,724,117	(2.48)
JUMLAH ASET TETAP	41,465,359,494	44,037,224,705	(2,571,865,211)	(5.84)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	6,713,300	6,713,300	0	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(6,713,300)	(6,713,300)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	0.00
JUMLAH ASET	47,400,427,861	55,551,742,350	(8,151,314,489)	(14.67)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,058,568,442	1,145,703,528	(87,135,086)	(7.60)
Pendapatan Diterima Dimuka	1,574,667	6,298,667	(4,724,000)	(75.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,060,143,109	1,152,002,195	(91,859,086)	(7.97)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,060,143,109	1,152,002,195	(91,859,086)	(7.97)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	46,340,284,752	54,399,740,155	(8,059,455,403)	(14.81)
JUMLAH EKUITAS	46,340,284,752	54,399,740,155	(8,059,455,403)	(14.81)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU STOK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Instansi: Dinas P2 KB dan P3
 Nama Provinsi/Kab/Kota: Riau/
 Jl. Terbuk No. 1 Pekanbaru 28125

Nama Barang: Kondom
 Satuan: 1
 Kode Barang: K13M
 Sumber Dana:

-Titik permintaan Darurat: 71.5 bulan;
 sejumlah.....
 -Titik Stok Realokasi: 8 bulan;
 sejumlah.....

KARTU STOK

TANGGAL	No. SBBK / Dokumen lainnya	DARI KE	SPESIFIKASI			JUMLAH		PENYESUAIAN (RUSAK / HILANG / KADALUWARSAR)	SISA	HARGA		DANA dan IN PETUG
			NOMOR BETS	TAHUN PRODUKSI	BATAS KADALUWARSAR	MASUK	KELUAR			HARGA SATUAN	TOTAL NILAI BARANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(10x11)	
23-07-20	Stok Awal I	Stok Awal	180662-S	-	31-05-23	142	0	0	1.642	Rp. 97.630	Rp. 160.308.460	APBN
23-07-20	Stok Awal I	Stok Awal	180652-C	-	31-05-23	660	0	0	1.500	Rp. 97.630	Rp. 146.445.000	APBN
23-07-20	Stok Awal I	Stok Awal	180652-V	-	31-05-23	840	0	0	840	Rp. 97.630	Rp. 82.009.200	APBN
25-08-20	002/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/VIII/2020	Kota Pekanbaru	180662-S	-	31-05-23	0	142	0	1.500	Rp. 97.630	Rp. 146.445.000	APBN
25-08-20	002/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/VIII/2020	Kota Pekanbaru	180652-C	-	31-05-23	0	558	0	942	Rp. 97.630	Rp. 91.967.460	
26-08-20	003/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/VIII/2020	Rokan Hulu	180652-C	-	31-05-23	0	102	0	457	Rp. 97.630	Rp. 44.616.910	APBN
26-08-20	003/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/VIII/2020	Rokan Hulu	180652-V	-	31-05-23	0	383	0	559	Rp. 97.630	Rp. 54.575.170	APBN
31-08-20	004/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/VIII/2020	Indragiri Hulu	180652-V	-	31-05-23	0	46	0	411	Rp. 97.630	Rp. 40.125.430	APBN
31-08-20	005/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/VIII/2020	Indragiri Hilir	180652-V	-	31-05-23	0	26	0	385	Rp. 97.630	Rp. 37.587.550	APBN
18-09-20	009/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Rokan Hilir	180652-V	-	31-05-23	0	21	0	364	Rp. 97.630	Rp. 35.537.320	APBN
24-09-20	010/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Pelalawan	180652-V	-	31-05-23	0	118	0	246	Rp. 97.630	Rp. 24.016.980	APBN
25-09-20	011/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Kota Dumai	180652-V	-	31-05-23	0	96	0	150	Rp. 97.630	Rp. 14.844.500	APBN
27-09-20	012/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Kepulauan Meranti	180652-V	-	31-05-23	0	33	0	117	Rp. 97.630	Rp. 11.422.710	APBN
01-10-20	Stok Opname	Stok Opname	180652-V	-	31-05-23	0	0	-2	115	Rp. 97.630	Rp. 11.227.450	APBN
04-10-20	013/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Kuantan Singingi	180652-V	-	31-05-23	0	10	0	105	Rp. 97.630	Rp. 10.251.150	APBN
04-10-20	014/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Siak	180652-V	-	31-05-23	0	18	0	87	Rp. 97.630	Rp. 8.493.810	APBN
11-10-20	014/SBBK/RUT-BKKBNRIAU/IX/2020	Bengkalis	180652-V	-	31-05-23	0	17	0	70	Rp. 97.630	Rp. 6.834.100	APBN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Anggi Lalita adalah anak kelima dari Bapak Ismail dan Ibu Salinah. Lahir pada tanggal 25 Februari 2000 di Bukit Tiram, Aceh Timur.

Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah SDN 006 Bencah Kelubi, Kec.Tapung samapi tahun 2012,Kemudian dilanjutkan di SMPN 4 Tapung, Kec. Tapung Kab.Kampar sampai tahun 2016. Setelah itu di lanjutkan pendidikan di SMAN 2 Tapung Kec. Tapung Kab. Kampar Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan tamat tahun 2018 Kemudian penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, kerabat, sahabat dan teman-teman serta bimbingan dari ibuk **Febri Rahmi, SE, MSc, Ak, CA** dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : “Analisis Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAP No.05 Tahun 2010 Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Provinsi Riau”. Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, penulis berhak menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).